

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Goenawan, Kian. *Sertifikat Tanah & Properti Praktis*. Yogyakarta: Best Publisher, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Panduan Mengurus Izin Tanah Properti Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Grahatama, 2008.
- Hadiwiyono, Suharyono M. *Hukum Pertanahan Di Indonesia*. Malang: Inteligencia Media, 2020.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Jilid I*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Santoso, Urip. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sembiring, Jimy Joses. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: VisiMedia, 2010.
- Silviana, Ana. *Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah*. Semarang: Univeristas Diponegoro, 2012
- Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum*. Bali: Universitas Udayana, 2017.
- Sutedi, Adrian. *Sertipikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Waskito, Hadi Arnowo. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.

### INTERNET

- Aisah, Nur. "Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Jual Beli Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Lampung." *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya*, 2013: 9
- Anatami, Darwin. "Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertipikat Ganda Atas Sebidang Tanah." *Jurnal Samudra Keadilan*, 2017: 7

- Azhar, Kornelius Benuf dan Muhamad. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, 2020: 23
- Chandra, Rendra Onny Fernando. "Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah Menurut PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020: 363
- Damar Ariadi, Agus Saptono. "Pembatalan Sertipikat Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah." *Jurnal Repertorium*, 2017: 136
- Hadi, Martinus. "Tanggungjawab BPN Terhadap Sertipikat yang Dibatalkan PTUN." *Jurnal Lex et Societatis*, 2014: 49
- Happy, Luh Putu. "Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kantor Pertanahan." *Jurnal Hukum Persada*, 2019: 27
- I Gusti Agung Dwi Satya Permana, I Ketut Sandi Sudarsana. "Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Bidang Tanah." *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2014: 143
- Kusno, Ade Parlaungan Nasution. "Penyuluhan Hukum Manfaat Pentingnya Pendaftaran Tanah Bagi Masyarakat Desa Hasang." *Fakultas Hukum Labuanbatu*, 2019: 11
- Made Putri Sarawati, dkk. "Kedudukan Hukum Akta PPAT Setelah Terbitnya Sertipikat Karena Peralihan Hak Atas Tanah." *Jurnal Ilmia Prodi Magister Kenotariatan*, 2017: 30
- Marhel, Jolanda. "Proses Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana*, 2017: 250
- Meray. "Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Jurnal Law Review*, 2006: 93
- Mintaraningrum, Yuyun. "Aspek Kepastian Hukum Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah." *Jurnal Represtorium*, 2015: 112
- Mulyadi, Mohammad. "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 2011: 128
- Pangemanan, Estevina. "Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah." *Jurnal Privatum*, 2013: 61
- Panget, Ardiles Eric. "Penyelesaian Hak Atas Tanah yang Memiliki Sertipikat Hak Milik Ganda." *Jurnal Lex Administratum*, 2013: 43

- Perdana, Septivany Christa. "Sertipikat Ganda Pada Proyek Pembangunan Rumah Susun." *Jurnal Legal Reasoning*, 2018: 73
- Permadi, Iwan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertipikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum." *Jurnal Yustisia*, 2016: 455
- Prasetyo Aryo Dewandaru, dkk. "Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional." *Jurnal Notarius*, 2020: 154
- Putriyanti, Ayu. "Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Dalam Kaitannya Dengan Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Pandecta*, 2017: 186
- Ramdhani, Rahmat. "Jaminan Kepastian Hukum yang Terkandung Dalam, Sertipikat Hak Atas Tanah." *Jurnal De Lega Lata*, 2017: 147
- Rumadan, Ismail. "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2012: 437
- Sahono, Linda S.M. "Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dan Implikasi Hukumnya." *Jurnal Perspektif*, 2012: 93
- Santoso, Urip. "Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah." *Jurnal Dinamika Hukum*, 2012: 187
- Satrawan, Made Ari Putra Sudana dan Ketut Wetan. "Proses Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas dan Perlindungan Hukumnya Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Pengadilan Negeri Singaraja." *Jurnal Hukum Kertha Widya*, 2017: 14
- Sibua, Haris Yonatan Parmahan. "Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama kali." *Jurnal Negara Hukum*, 2011: 288
- Sihombing, Irene Eka. "Lembaga Rechtsverwerking Solusi Mengatasi Sengketa Tanah." *Jurnal Hukum Prioris*, 2016: 60
- Soleh, Mohammad Afifudin. "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap." *Jurnal Mimbar Keadilan Ilmu Hukum*, 2018: 21
- Suhaimi. "Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia*, 2018: 206
- Suswoto, Francisca Roman Harjiyatni dan. " Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Fungsi Peradilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2017: 605
- Titin Fatimah, Hengki Andora. "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014: 41

Vina Herviani, Angky Febriansyah. "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung." *Jurnal Riset Akuntansi*, 2016: 23

Wandha Noviaditama, Endang Sri Santi Triyono. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Sertipikat Ganda." *Jurnal Law Review*, 2012: 47

Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Hukum." *Jurnal Pranata Hukum*, 2011: 129

Zuman Malaka, Habib Adjie. "Tanggungjawab Kantor Pertanahan Terhadap Terbitnya sertipikat ganda." *Jurnal Al-Qanum*, 2017:260

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Peraturan Presiden Republik Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

## **INTERNET**

Ardianto, Yoni. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. 06 Maret Rabu, 2019. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id> (accessed 13 November Jumaat, 2020).

Azis, Arasy Pradana A. *Jenis-Jenis Hak Atas Tanah dan yang Dapat Menjadi Pemegangnya*. 18 Juni Kamis, 2020. <https://www.hukumonline.com> (accessed 29 Juli Rabu, 2020).

Kusnadi, Ady. *Tanah*. Desember 2006. <https://www.bphn.go.id> (accessed 14 November Sabtu, 2020).

Oktavira, Bernadetha Aurelia. *Arti Mutatis Mutandis dan Contohnya*. 23 Juli Kamis, 2020. <https://www.hukumonline.com> (accessed 18 November Rabu, 2020).

Pahlevi, Antonius Alreza. *Mengenal Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah dan Prosedurnya*. 14 Juli Selasa, 2020. <https://www.hukumonline.com> (accessed 9 Oktober Jumaat, 2020).

Prahassacitta, Vidya. *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*. 26 Mei Selasa, 2020. <https://www.business-law.binus.ac.id> (accessed 14 November Sabtu, 2020).

Tunardy, Wibowo T. *Hak-Hak Atas Tanah*. Maret Jumaat, 2013. <https://www.jurnalhukum.com> (accessed 27 Oktober Selasa, 2020).

Tunardy, Wibowo T. *Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah*. Desember Sabtu, 2013. <https://www.jurnalhukum.com> (accessed November Kamis, 2020).

Waskito, Hadi Arnowo. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.